

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 DALAM
PENANGGULANGAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL
(Studi Kasus Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang)**

Almaditya Melisa Adam Pulungan
NPP. 30.0326
Asdaf Kota Palembang , Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: 04almaidityamelisa@gmail

Pembimbing Skripsi: Dr. Rosmery Elsy, SH.,M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Street children in Indonesia are a social problem that exists throughout Indonesia including Palembang City. **Purpose:** this study is intended to find out and analyze how the implementation of Regional Regulation Number 12 of 2013 in the management and development of street children by social services. **Method:** in this study the research method used is qualitative descriptive method. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusions. The focus of this research uses George C. Edwards III's policy implementation theory which emphasizes the dimensions of communication, resources, dispositions / attitudes and bureaucratic structure. **Result:** Based on the results and discussion of the implementation of Regional Regulation Number 12 of 2013 in the handling and development of street children by the Palembang City Social Office, especially in the Ilir Timur I District, so far it has been running well but still less than optimal. **Conclusion:** this research is still roaming street children in Ilir Timur I sub-district although it is quite conducive but there are still street children roaming around traffic lights and streets even though they have been arrested repeatedly and given guidance from the Social Service. As well as efforts that can be carried out by social services, there are also periodic and widespread socialization and urging the community to assist the government in handling street children and also propose additional budgets to the government to support facilities and infrastructure for handling street children's problems.

Keywords: Implementation, Coping policy and coaching, street children

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): anak jalanan di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang ada di seluruh wilayah Indonesia termasuklah Kota Palembang. **Tujuan:** penelitian ini dimaksud untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Dan Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial. **Metode:** dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode

kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan antara lain berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan pada dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil dan pembahasan Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 dalam penanggulangan dan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Palembang yang khususnya pada daerah Kecamatan Ilir Timur I selama ini sudah berjalan dengan baik tetapi masih kurang maksimal. **Kesimpulan:** penelitian ini masih berkeliarannya anak jalanan di Kecamatan Ilir Timur I walaupun sudah cukup kondusif namun masih ada anak jalanan berkeliaran di sekitaran lampu lalu lintas dan jalanan padahal sudah ditangkap berulang kali dan di berikan pembinaan dari Dinas Sosial. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh dinas sosial adalah dengan dilakukan sosialisasi secara berkala dan secara meluas dan menghimbau masyarakat untuk membantu pemerintah dalam penanganan anak jalanan dan juga mengajukan penambahan anggaran kepada pemerintah untuk menunjang sarana dan prasarana penanganan masalah anak jalanan. **Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak Jalanan merupakan permasalahan sosial yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia termasuklah di kota Palembang, fenomena mengenai anak jalanan kerap menjadi permasalahan pemerintah karena turunnya mereka ke jalanan mengganggu masyarakat dan juga ketertiban lalu lintas hal ini cukup meresahkan masyarakat, dalam penanganan anak jalanan ini pemerintah daerah kota Palembang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Dalam penanganan anak jalanan ini perangkat daerah yang berwenang dalam penanggulangan dan pembinaan anak jalanan adalah Dinas Sosial dan juga beberapa instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja, dari Dinas Sosial sendiri sudah melakukan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan sesuai dengan prosedur yang terdapat pada Perda no. 12 Tahun 2013, keberadaan anak jalanan sudah mulai menurun tetapi masih saja ada anak jalanan yang turun ke jalanan.

Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dari dinas sosial kota Palembang ada dua faktor yang menyebabkan anak jalanan turun ke jalanan yakni sebagai berikut:

1. faktor ekonomi yang membuat mereka mencari kebutuhan di luar karena tidak tercukupinya kebutuhan hidup mereka karena orang tua yang kurang mampu, dan
2. faktor lingkungan, dimana mereka terpengaruh dengan keberadaan dan situasi lingkungan, mereka merasa nyaman di lingkungan tersebut kemudian mereka ikut gerakan mungkin ada juga organisasi-organisasi semacamnya, dan mereka terpengaruh dari lingkungan tersebut.

Dari faktor di atas kita mengetahui bahwa mengapa anak jalanan turun ke jalan, dalam hal ini pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi permasalahan sosial ini dengan di keluarkannya perda no 12 tahun 2013 serta untuk memperkuat perda tersebut pemerintah kota Palembang juga mengeluarkan peraturan walikota Palembang no 17 tahun 2014 tentang tata cara penjangkauan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Kebijakan ini di keluarkan untuk mengatasi permasalahan sosial mengenai anak jalanan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil fokus penelitian di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. Kecamatan ini merupakan daerah pusat kota Palembang dimana terdapat kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta terdapat pula pasar terbesar yang ada di Kota Palembang karena itu masih banyak ditemukan anak jalanan yang berkeliaran di daerah ini.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak jalanan turun ke jalan yakni faktor ekonomi yang membuat mereka mencari kebutuhan di luar karena tidak tercukupinya kebutuhan hidup mereka karena orang tua yang kurang mampu, dan faktor lingkungan, dimana mereka terpengaruh dengan keberadaan dan situasi lingkungan, mereka merasa nyaman di lingkungan tersebut kemudian mereka ikut gerakan mungkin ada juga organisasi-organisasi semacamnya, dan mereka terpengaruh dari lingkungan tersebut.

Dari faktor di atas kita mengetahui bahwa mengapa anak jalanan turun ke jalan, dalam hal ini pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi permasalahan sosial ini dengan di keluarkannya Perda No 12 Tahun 2013 serta untuk memperkuat Perda tersebut pemerintah Kota Palembang juga mengeluarkan Peraturan Walikota Palembang No 17 Tahun 2014 tentang tata cara penjangkauan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Kebijakan ini di keluarkan untuk mengatasi permasalahan sosial mengenai anak jalanan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil fokus penelitian di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. Kecamatan ini merupakan daerah pusat kota Palembang dimana terdapat kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta terdapat pula pasar terbesar yang ada di Kota Palembang karena itu masih banyak ditemukan anak jalanan yang berkeliaran di daerah ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penanganan dan pembinaan mengenai anak jalanan. Penelitian (Andi Wahyudi 2019) berjudul *Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar*, fokus pada penelitian ini yakni mengenai anak jalanan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas sosial Kota Makassar disini berperan sebagai pengganti orang tua, guru dan sebagainya hambatan yang di hadapi adalah kekurangan dana dari pemerintah. Penelitian Hikmah Sagita memberikan hasil penelitian bahwa dari pengimplementasian kebijakan yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Jambi pada pembinaan anak jalanan sudah berjalan baik sesuai petunjuk pelaksanaan namun dalam hal pembinaan masih belum efektif karena masih ada masalah yang terjadi di lapangan (Hikmah Sagita, 2019). Penelitian Syahrul dan Amika yang berjudul *Analisis Kebijakan Pendidikan untuk Anak Jalanan di Kota Yogyakarta*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran keluarga dalam pembinaan anak jalanan hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pelayanan pendidikan formal khusus bagi anak jalanan sudah tidak relevan dengan keadaan kehidupan saat ini (Syahrul dan Amika, 2017).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yakni dimana konteks penelitian yang penulis teliti adalah mengenai pengimplementasian dari peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 dalam penanganan dan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial yang berlokasi di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang, diketahui dari penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam penanganan anak jalanan selain dinas sosial yang berwenang

menangani pembinaan dan penertiban anak jalanan SATPOL PP juga ikut serta dalam penanganan anak jalanan di Kota Palembang. Dalam hal penanganan dan juga pembinaan anak jalanan Dinas Sosial diketahui membuat beberapa kebijakan untuk membantu mereka dalam proses penertiban seperti melakukan penjangkauan dan pembinaan pada anak jalanan. Hasil dari penelitian ini yang membuat beda dari penelitian sebelumnya ialah pengimplementasian dari peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 sudah berjalan baik dan berjalan sesuai prosedur akan tetapi belum maksimal karena kekurangan dana seperti halnya renovasi rumah singgah yang masih belum terlaksana serta sarana dan prasarana lain untuk menunjang penanganan anak jalanan oleh dinas sosial masih kurang.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengimplementasian dari kebijakan yang dibuat pemerintah untuk penanganan anak jalanan yaitu implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2013 dalam penanggulangan dan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang di dapatkan di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan antara lain berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan pada dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Dan Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial.

Implementasi Peraturan daerah no 12 Tahun 2013 merupakan kebijakan yang mengatur mengenai penanggulangan dan pembinaan anak jalanan yang ada di Kota Palembang dan instansi yang berwenang dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah Dinas Sosial. dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mendapatkan data dan wawancara berdasarkan fakta dan realita yang terjadi dilapangan mengenai implementasi kebijakan penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Dari Edward III dengan 4 Dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Pada dimensi komunikasi ini sudah terimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan indikator keberhasilan pada teori implementasi Edward III terdapat tiga indikator yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi proses transmisi dalam implementasi kebijakan dari Perda Nomor 12 Tahun 2013 mengenai penanggulangan Anak Jalanan di kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik dengan tersampainya maksud dan tujuan kebijakan ini baik melalui sosialisasi dan juga melalui media cetak, media massa dan online. pada indikator kejelasan ini dapat diketahui bahwa perda no 12 tahun 2013 memiliki tujuan yang jelas dalam penanggulangan, mencegah dan membina anak jalanan dan Dinas Sosial sebagai

pihak pelaksana sudah paham betul tujuan dan maksud dari Perda no. 12 Tahun 2013. Dan pada indikator konsistensi dari faktor komunikasi sudah berjalan dengan baik penyampaian informasi mengenai kebijakan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan sudah dilakukan secara konsisten melalui sosialisasi, media massa dan online dan tersampaikan dengan baik khususnya warga masyarakat di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

2. Sumber Daya

Dimensi sumber daya dalam teori implementasian kebijakan oleh Edward III pada Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 dalam peanggulangan dan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial dapat dikatakan baik namun masi ada minus yakni diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Palembang tidak memiliki tempat pembinaan yang memadai atau masi belum adanya wadah bagi Dinas Sosial untuk menampung anak jalanan dan anak terlantar yang telah di tangkap, karena Rumah Singgah milik Dinas Sosial Kota Palembang masi dalam tahap ditanggungkannya Renovasi karena masalah anggaran, dimana dana anggaran dialihkan pada masa pandemic Covid-19. Selebihnya implementasi dari faktor Sumber Daya sudah berjalan baik sebagaimana yang ada pada Perda No. 12 tahun 2013 ini.

3. Disposisi / Sikap

Pada dimensi disposisi atau sikap dalam teori implementasi Edward III bahwa pegawai yang menangani masalah anak jalanan sudah sesuai dengan standar kualitas yang baik serta masalah pemberian insentif pada Pegawai Dinas Sosial diketahui tidak ada pemberian insentif khusus karena setiap pegawai memiliki insentifnya masing-masing dari tunjangan kinerja mereka.

4. Struktur Birokrasi

Pada faktor struktur birokrasi dari teori implementasi kebijakan Edward III ini bahwa Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 dalam peanggulangan dan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial sudah melaksanakan kegiatan sesuai SOP yang berlaku serta pembagian kerja juga sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing dengan berpedoman pada Perda No. 12 Tahun 2013 dan juga Perwali No. 17 Tahun 2014 yakni kebijakan penanggulangan dan pembinaan anak jalanan.

3.2. Upaya Dan Strategi Dinas Sosial Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Dan Pembinaan Anak Jalanan khususnya di Kecamatan Ilir Timur I.

1. Melakukan sosialisasi lebih tentang Perda Nomor 12 Tahun 2013

Sosialisasi merupakan hal penting dalam suatu implementasi kebijakan Dinas Sosial disini harus lebih berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dalam penanganan anak jalanan di Kota Palembang Khususnya di Kecamatan Ilir Timur I. dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan bahwa sosialisasi harus di lakukan karena dengan sosialisasi membantu masyakat untuk paham dan mau di ajak bekerjasama dengan pemerintah dalam penanganan anak jalanan ini.

2. Memberikan Efek Jera kepada Anak Jalanan yang masi berkeliaran

Upaya dari dinas sosial adalah dengan memberikan efek jera kepada anak jalanan yang masi turun kejalanan. Dari data yang penulis dapat di lapangan bahwa upaya dan strategi dinas sosial

dalam memberikan efek jera yakni dengan melakukan penyitaan dari barang mereka, hal ini dapat menimbulkan efek jera namun tidak lama karena penyitaan barang bisa di kembalikan ke anak jalanan itu dan mereka sewaktu-waktu dapat turun ke jalanan lagi , karena Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan dalam menghancurkan barang sitaan itu.

3. Mengajukan penambahan Anggaran dalam pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial yakni melakukan upaya pengajuan anggaran kepada pemerintah Kembali untuk dana renovasi pembangunan rumah singgah dan sarana prasarana penunjang baru untuk pelaksanaan kebijakan dari Perda no. 12 tahun 2013 mengenai anak jalanan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada proses pengimplementasian peraturan daerah no 12 tahun 2013 dalam penanggulangan dan pembinaan anak jalanan oleh dinas sosial pada saat melaksanakan penelitian ini penulis menemukan hasil penelitian yakni proses pengimplementasian dari perda no 12 tahun 2013 sudah berjalan baik namun masi belum optimal karena rumah singgah yang belum selesai di renovasi dan juga kurangnya peraturan untuk memberikan efek jera pada anak jalanan yang turun ke jalanan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Wahyudi, 2019, yakni penelitian menunjukkan bahwa dinas sosial kota makassar disini berperan sebagai pengganti orang tua, guru dan sebagainya hal yang sama dengan yang penulis teliti yakni hambatan yang di hadapi adalah kekurangan dana dari pemerintah. Dari hasil penelitian yang telah penulis teliti penulis menyarankan kepada pihak Dinas Sosial yaki mengajukan kepada pemerintah untuk membuat aturan khusus yang mengatur sanksi yang jelas untuk memberikan efek jera pada anak jalanan yang di tangkap dan juga mengajukan penambahan anggaran untuk memperbaiki fasilitas Dinas Sosial seperti rumah singgah dan lainnya.

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa implementasian peraturan daerah no 12 tahun 2013 dalam penanggulangan dan pembinaan anak jalanan oleh dinas sosial khususnya pada Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah namun masi belum optimal yakni dari fasilitas seperti rumah singgah yang belum selesai di renovasi karena kurangnya anggaran , perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai kebijakan penanganan anak jalanan agar masyarakat turut berpartisipasi membantu pemerintah untuk penanganan anak jalanan serta perlunya peraturan lebih lanjut untuk memberikan sanksi daan efek jera kepada anak jalanan secara tegas agar tidak turun kejalanan lagi setelah berulang kali di tangkap.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih serta penelitian ini juga dilakukan secara apa adanya dengan data yang di peroleh di dapatkan dari apa yang ada di lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan bahwa implementasian peraturan daerah no 12 tahun 2013 dalam penanggulangan dan pembinaan anak jalanan oleh dinas sosial khususnya pada

Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang agar selanjutnya dapat menemukan hasil yang mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Sosial dan Kecamatan Ilir Timur 1 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Edward III, Georg C. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Syahrul. Wardana, Amika. 2017. *Analisis Kebijakan Pendidikan Untuk Anak Jalanan Di Kota Yogyakarta*. *Harmoni Sosial*, Vol. 4, No.2
- Sagita Hikmah. 2021. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Di Dinas Sosial Kota Jambi)*. Uinjambi
- Wahyudi Andi. 2021. *Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar*. *KIMAP*, Vol. 2, No. 4

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Penemis
- Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis